



TIAP RUMAH TANGGA DAPAT RP 1 JUTA

Pemkot Validasi Warga Miskin

YOGYA (KR) - Warga miskin di Kota Yogyakarta mendapat alokasi dana Rp 1 juta setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS). Alokasi dana tersebut berasal dari kukuran Pemda DIY untuk program penanggulangan kemiskinan. Untuk memastikan jumlah penerima, Pemkot Yogya segera melakukan validasi warga miskin.

Koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad menuturkan, jika dibanding dengan kabupaten lain, maka kukuran dana untuk Kota Yogyakarta memang paling rendah. Hal ini karena disesuaikan dengan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. "Dana itu diberikan sesuai alokasi warga miskin. Sesuai data BPS itu, warga miskin yang mendapat jangkauan sebanyak 1.941 rumah

tangga sasaran. Sehingga, kami dapat Rp 1,9 miliar," paparnya, Senin (1/4).

Penggunaan dana tersebut, imbuh Edy, sepenuhnya akan diberikan kepada rumah tangga sasaran dalam bentuk uang tunai. Tiap rumah tangga, akan mendapatkan Rp 1 juta. Hanya saja, penggunaan uang tersebut mendapat pengawasan ketat dari pemkot. Terutama fungsinya untuk pengembangan atau pemberdayaan ekonomi.

Sebanyak 1.941 rumah tangga sasaran itu, tersebar dalam 5 kecamatan. Masing-masing Umbulharjo, Tegalrejo, Mergansan, Gondokusuman dan Mantrijeron. Saat ini, tiap camat dan lurah di wilayah setempat tengah melakukan proses validasi.

Dikhawatirkan, tanpa proses validasi maka data dari BPS tahun 2011 itu masih banyak yang berubah. Khususnya jika ada warga miskin penerima sasaran yang ternyata sudah pindah domisili atau bahkan telah meninggal dunia. "Hasil validasi sementara memang ada sebagian yang pindah dan meninggal dunia. Kalau yang meninggal, maka akan dialihkan ke ahli waris. Sedang yang pindah, kami konsultasikan lagi ke Pemda DIY," paparnya.

Ditargetkan pada Juni 2013 mendatang, program penanggulangan kemiskinan dari Pemda DIY tersebut sudah bisa diterima keluarga miskin. Dari program tersebut, penurunan kemiskinan diharapkan bisa mencapai 2 persen.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Rifky Listianto mengungkapkan, program tersebut cukup signifikan dalam meringankan kemiskinan. Akan tetapi, tanpa diikuti program serupa yang berkesinambungan, maka hasilnya bisa kurang optimal.

Oleh karena itu, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Yogyakarta juga perlu bersinergi tidak tidak bergantung pada bantuan dana dari Pemda DIY maupun pemerintah pusat. (R-9)-c

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005